

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN BORONGAN PEKERJAAN DIBIDANG JASA BACA  
METER ANTARA PT. PLN (PERSERO) CABANG SIGLI DENGAN PT.  
MULTI GUNA PUTRA ACEH MANDIRI**

**ELVIRA ROSALLY OKTAVIANI**

***ABSTRACT***

*The research problems are how about the process of the implementation of contracted work contract in recording electric meter between PT. PLN (PERSERO) Sigli branch, and PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri and how about the settlement and the liability of the party that breaches the contract (default). The research used judicial normative and descriptive analytic methods which described, analyzed, and explained the legal provisions in theory and practice obtained from field study. The result of the research showed that PT. PLN (PERSERO) has breached the contract (default) to PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri because up to now PT. PLN (PERSERO) Sigli branch has not paid off the fee to PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri although the contracted work in recording electric meter is in accordance with the contract signed by both parties.*

***Keywords: Contract in Recording Electric Meter***

**I. Pendahuluan**

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional, serta menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi Negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

PT. PLN (Persero) menyadari, bahwa masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari selalu menggunakan listrik dan sangat bergantung dengan listrik. PT. PLN (Persero) berusaha semampunya untuk melayani semua masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Tetapi, tentunya pihak PT. PLN (Persero) dalam hal melayani masyarakat baik dalam Kota maupun luar Kota, khususnya di Provinsi Aceh tidak mungkin bekerja sendiri. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang menyediakan jasa,

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

khususnya dibidang ketenagalistrikan. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek, menyebabkan pengaturan hak, kewajiban, tanggung jawab serta hubungan hukum diantara para pihak menjadi sulit.

Oleh karena itu untuk memudahkan pengaturan hal-hal tersebut, dibuatlah suatu perjanjian kontrak kerja sama, dimana para pihak sepakat untuk mengatur sendiri hak, kewajiban serta segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan tersebut dalam suatu kontrak kerja konstruksi yang merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Karena menurut ketentuan hukum di Indonesia siapa yang membuat kesepakatan perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis, maka isi dari kontrak itu atau segala hal yang diatur dalam kontrak perjanjian itu adalah menjadi Undang-Undang dan kekuatan hukumnya sama dengan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat.

Segala hal yang diatur dalam suatu kontrak/perjanjian harus dinegosiasikan terlebih dahulu pasalnya satu demi satu dan ayat dari kontrak tersebut secara cermat. Agar tidak ada kontrak yang tidak benar atau berat sebelah yang mungkin akan menimbulkan sengketa dikemudian hari

Ikatan kerja antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang digunakan sebagai dasar hukum, adalah kontrak kerja. Pada umumnya kontrak kerja berisi tentang pembagian hak dan kewajiban diantara keduanya. Kontrak kerja berarti perikatan tertulis antara pengguna jasa (pemilik proyek/pemberi tugas) dan penyedia jasa (konsultan perencana/kontraktor pelaksana/konsultan pengawas) mengenai kegiatan pekerjaan borongan baca meter .

Kenyataannya, hak dan kewajiban dari para pihak sering menjadi permasalahan dalam suatu perjanjian. Hal ini sama dengan yang terjadi antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri. Karena PT. PLN (Persero) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu kontrak perjanjian pemborongan pekerjaan jasa baca meter antara PT. PLN (Persero) dan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri. Kedua belah pihak terikat kontrak kerjasama selama 4 tahun.

Namun, pada kenyataannya dalam hal pembayaran upah kerja, PT. PLN (Persero) tidak membayarnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga menimbulkan penunggakan upah pembayaran kepada PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri. Sementara, PT. Multi Guna Aceh Mandiri telah mengerjakan kewajibannya tepat waktu dan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka tertarik untuk diteliti lebih jauh lagi permasalahan ini, dan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian borongan pekerjaan dibidang jasa baca meter antara PT. PLN (Persero) Cabang Sigli dengan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri?
2. Apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian borongan pekerjaan dibidang jasa baca meter antara PT. PLN (Persero) Cabang Sigli dengan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri?
3. Bagaimanakah penyelesaian dan pertanggungjawaban pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian borongan pekerjaan dibidang jasa baca meter antara PT. PLN (Persero) Cabang Sigli dengan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri?

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian borongan pekerjaan dibidang jasa baca meter antara PT. PLN (Persero) Cabang Sigli dengan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian borongan pekerjaan dibidang jasa baca meter antara PT. PLN (Persero) Cabang Sigli dengan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri.
3. Untuk menjelaskan penyelesaian dan pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian borongan pekerjaan dibidang jasa baca meter antara PT. PLN (Persero) Cabang Sigli dengan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang terdiri dari ;

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>2</sup>
  - 1) Bahan hukum primer, artinya bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu antara lain;
    - a) Norma Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
    - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
    - d) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang berkaitan dengan penelitian.
  - 3) Bahan tertier, yaitu bahan pendukung di luar bidang hukum, seperti; kamus ensiklopedia, majalah-majalah yang terkait dengan penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian, maka dilakukan wawancara kepada;
  - 1) General Manager PT. PLN (Persero) Cabang Sigli, berjumlah 1 (satu) orang.
  - 2) Bendahara PT. PLN (Persero) Cabang Sigli, berjumlah 1 (satu) orang.
  - 3) Direktur PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri, berjumlah 1 (satu) orang.

## III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hukum Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai bagian dari KUH PERDATA yang terdiri dari IV Buku. Buku I mengenai Hukum Perorangan/ *Personenrecht*, Buku ke II memuat ketentuan Hukum Kebendaan/ *Zakenrecht*, Buku ke III mengenai Hukum

---

<sup>2</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press), 1995, hal. 39.

Perjanjian/ *Verbintenissenrecht*, sedangkan Buku ke IV mengatur Pembuktian dan Kadaluarsa/ *Bewijs en Verjaring*.<sup>3</sup>

KUH Perdata sebagai Undang-Undang mulai berlaku atau diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847 (St No.23/1847). Dari tahun pengundangannya jelas dapat kita ketahui, dalam Buku III mengatur Hukum Perjanjian adalah Undang-Undang produk Kolonial Belanda.<sup>4</sup>

Perjanjian di dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III, dengan judul “Tentang Perikatan.” Perkataan perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.<sup>5</sup>

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan sebagian ahli hukum menempatkan perjanjian sebagai bagian tersendiri dari hukum perjanjian karena perjanjian sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Dalam KUH Perdata, hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari Undang-Undang.<sup>6</sup>

Istilah perjanjian atau kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).<sup>7</sup> Perjanjian adalah merupakan salah satu sumber perikatan. Hal tersebut landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”. Akan tetapi perikatan yang lahir karena perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni), 1986, hal. 3.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa), 1979, hal. 122.

<sup>6</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hal. 1.

<sup>7</sup>Salim HS., H., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2003, hal. 15.

Pasal 1601b KUH Perdata mengartikan pemborongan kerja sebagai suatu persetujuan. Pihak pemborong mengikatkan diri kepada pihak pemberi borongan untuk “menyelesaikan” suatu borongan “tertentu”, dan sebagai imbalan atas penyelesaian tersebut, pihak pemborong mendapat prestasi harga tertentu sebagai upah.<sup>8</sup>

Perjanjian pemborongan tergolong dalam ruang lingkup perjanjian untuk melakukan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Buku III Bab VII A KUH Perdata. Dalam Undang-Undang, perjanjian untuk melakukan pekerjaan dibagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah perjanjian yang menyebutkan bahwa pihak yang satu menugaskan suatu pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada pihak yang lain secara swasta menyelenggarakan jasa-jasanya bagi umum, dan oleh pihak yang akhir diterima baik berdasarkan imbalan yang lazim untuk itu.
2. Perjanjian kerja/perburuhan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan. Untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang memborongkan. Dimana si pemborong menerima suatu harga yang ditentukan.

Ketiga, perjanjian di atas ini memiliki kemiripan yaitu sama-sama menyebutkan bahwa ”Pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan pembayaran tertentu.”

Perbedaan antara pekerjaan kerja dengan perjanjian pemborongan adalah dimana dalam perjanjian kerja buruh sebagai bawahan majikan dan berada di bawah kekuasaan majikan, atau dengan kata lain antara buruh dengan majikan mempunyai hubungan kedinasan, sedangkan pada perjanjian pemborongan pekerjaan tidak ada hubungan kedinasan semacam itu, dimana si pemborong melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya secara berdiri sendiri.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 258.

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan*, (Jogyakarta: Liberty), 1982, hal. 17.

Sedangkan yang membedakan perjanjian melakukan jasa dengan perjanjian pemborongan adalah dimana:

1. Pada penunaian jasa biasanya upah tidak disepakati sebelumnya, tapi dihitung berdasarkan tarif yang layak atau yang berlaku, sedangkan pada perjanjian pemborongan pekerjaan pembayaran dipersetujukan sebelumnya antara para pihak.
2. Pada perjanjian untuk melaksanakan jasa-jasa kegiatannya merupakan pelaksanaan suatu tugas tertentu yang ditentukan sebelumnya, sedangkan pada perjanjian pemborongan berupa mewujudkan suatu karya tertentu yang merupakan hasil pekerja.<sup>10</sup>

Dengan menguraikan persamaan dan perbedaan perjanjian pemborongan dengan perjanjian lainnya, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian pemborongan, yaitu "suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa pihak yang satu (pemesan) menugaskan kepada pihak yang lain (pemborong) untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan pembayaran tertentu (harga borongan) dan pihak ini sepakat dengan pihak pertama untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan pembayaran."<sup>11</sup>

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian borongan pekerjaan dibidang jasa baca meter, yaitu sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero) Cabang Sigli
  - a. Hak PT. PLN (Persero) Cabang Sigli, yaitu antara lain;
    - 1) Menerima laporan berkala, hasil kinerja baca angka meter.  
Laporan ini, didapatkan secara bulanan dengan menggunakan formulir terlampir selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pembacaan terakhir.
    - 2) Menerima laporan daftar pemakaian perkoordinator, DPM, nama pembaca setiap bulan.
    - 3) PT. PLN (Persero) Cabang Sigli dapat mengubah lingkup pekerjaan, persyaratan teknis, pelaporan, pengawasan, dan pengamanan pekerjaan pembacaan/pencatatan kWh meter PLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 yang tercantum di dalam kontrak dan harus disertai dengan Berita Acara Penjelasan yang disepakati oleh PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri.
    - 4) Menerima penyerahan (Upload) data bersih hasil pencatatan kWh meter (setelah dilakukan verifikasi) dari PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri

---

<sup>10</sup> C. Smit. *Masalah Perjanjian Pemborongan (terjemahan Hr Sugihardjo)*. Yogyakarta, tanpa tahun, hal. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 6.

secara harian selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pembacaan dan penyerahan dilengkapi dengan berita acara.

- 5) Menerima laporan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan apabila ada melakukan perubahan data susunan personil, penanggung jawab dan contact person pada struktur organisasi manajemen.
  - 6) Menerima data mengenai tenaga kerja yang ditempatkan di Cabang Sigli meliputi; site manajer, staf personalia dan administrasi, supervisor, koordinator, petugas baca meter, verifikator, staf verifikator, dan staf informasi teknologi (IT).
  - 7) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dan berhak memberikan teguran jika terjadi penyimpangan atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan lingkup pekerjaan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dalam kontrak.
  - 8) Menerima Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*)<sup>12</sup> yang diterbitkan oleh Bank Umum (*Surety Bond*)<sup>13</sup> yang ditunjuk Pemerintah dan berlaku efektif pada tanggal berlakunya PERJANJIAN dan mempunyai masa berlaku yang sama dengan PERJANJIAN ditambah dengan 30 (tiga puluh) hari.
- b. Kewajiban dari PT. PLN (Persero) Cabang Sigli, yaitu antara lain;
- 1) Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri, yang dalam hal pengawasan ini, kewajiban mengawasi diberikan kepada Manager PT. PLN (Persero) Cabang Sigli sebagai Direksi Pekerjaan dan Asisten Manajer Komersil PT. PLN (Persero) Cabang Sigli sebagai Pengawas Lapangan. Ketentuan ini sesuai dengan yang diatur dalam kontrak pada Pasal 2 mengenai Pemberi Kerja.
  - 2) Memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan;  
Peringatan atas keterlambatan ini tidak diatur dalam pasal-pasal didalam kontrak, melainkan diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, peringatan tersebut dapat berupa sebagai berikut:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
    - c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
    - d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
    - e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
  - 3) Membayar hasil pekerjaan setelah selesai seluruhnya sesuai waktu yang telah ditentukan, dan setelah PT. PLN (Persero) Cabang Sigli menerima permintaan pembayaran dari PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri.

## 2. Hak dan Kewajiban PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri

<sup>12</sup>*Performance Bond*, adalah garansi yang diberikan oleh bank untuk melaksanakan pembangunan proyek sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijanjikan antara terjamin sebagai pemborong pekerjaan pembangunan proyek dengan pemberi pekerjaan borongan.

<sup>13</sup>*Surety Bond* adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu ialah pemberi jaminan yang memberikan jaminan untuk pihak kedua (penyedia jasa) untuk kepentingan pihak pengguna jasa. Apabila pihak penyedia jasa lalai atau gagal menyelesaikan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan yang dijanjikan, maka pihak penjamin akan menggantikan kedudukan pihak yang dijamin tersebut untuk membayar ganti rugi maksimal sampai batas jumlah jaminan yang telah ditentukan oleh pemberi jaminan.



- a. Hak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri
  1. Menerima pembayaran hasil pekerjaan setelah selesai seluruhnya sesuai waktu yang telah ditentukan, dan setelah mengajukan permohonan pembayaran dengan melengkapi syarat sebagai berikut;
    - a. Surat Permintaan pembayaran.
    - b. Kwitansi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dan 2 (dua) rekaman/copy.
    - c. Berita Acara pekerjaan selesai yang terdiri dari;
      1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Borongan Outsourcing Cater yang ditandatangani oleh PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri dengan Asisten Manajer Komersial dan Supervisor Baca Cater, yang diketahui oleh Manajer PT. PLN (Persero) Cabang Sigli.
      2. Berita Acara dimulai Pencatatan kWh meter yang ditandatangani oleh PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri dengan Manajer dan Asisten Manajer Komersil PT. PLN (Persero) Cabang Sigli.
      3. Berita Acara Penyerahan Data Bersih Hasil Pencatatan kWh meter yang ditandatangani oleh PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri dengan Manajer dan Asisten Manajer Komersil PT. PLN (Persero) Cabang Sigli.
      4. Berita Acara Laporan Sambungan Liar/Menyala tanpa meter dan kelainan APP pelanggan yang tidak wajar yang ditandatangani oleh PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri dengan Manajer dan Asisten Manajer Komersil PT. PLN (Persero) Cabang Sigli.
      5. Rekap Pemakaian kWh per RBM yang ditandatangani oleh PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri dengan Manajer dan Asisten Manajer Komersil PT. PLN (Persero) Cabang Sigli dan Berita Acara penyerahan RBM yang telah digambar dan dipelihara.
      6. Rekap hasil Pencatatan kWh Meter yang ditandatangani oleh PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri dengan Manajer dan Asisten Manajer Komersil PT. PLN (Persero) Cabang Sigli.
      7. Laporan Kinerja Pembacaan Meter.
    - d. Laporan kelengkapan peralatan kerja, kantor, komputer, dan pembuatan RBM.
    - e. Copy Kontrak.
  - b. Kewajiban PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri
    1. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
    2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara berkala (bulanan) kepada PT. PLN (Persero) Cabang Sigli.
    3. Memberikan laporan daftar pemakaian perkoordinator, DPM, nama pembaca setiap bulan.
    4. Menyerahkan (Upload) data bersih hasil pencatatan kWh meter (setelah dilakukan verifikasi) secara harian selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pembacaan dan penyerahan dilengkapi dengan berita acara.
    5. Memberikan laporan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan apabila ada melakukan perubahan data susunan personil, penanggung jawab dan contact person pada struktur organisasi manajemen.

6. Memberikan data mengenai tenaga kerja yang ditempatkan di Cabang Sigli meliputi; site manajer, staf personalia dan administrasi, supervisor, koordinator, petugas baca meter, verifikator, staf verifikator, dan staf informasi teknologi (IT).
7. PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri wajib memberikan perlindungan kerja kepada tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
8. PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri harus menyediakan jumlah koordinator Baca Meter dalam jumlah yang cukup (dengan perbandingan 1 (satu) koordinator maksimal untuk 10 (sepuluh) petugas Baca Meter).
9. PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri wajib memberikan pelatihan atau kursus bagi tenaga kerjanya dan diutamakan bekerja sama dengan jasa pendidikan dan pelatihan (JASDIK) PT. PLN (Persero) Cabang Sigli.
10. PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri harus menyediakan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup, berkualitas, cakap dan terampil dibidangnya.
11. PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri wajib menyediakan administrasi perkantoran serta peralatan kerja yang menunjang pelaksanaan pekerjaannya, dan segala aktifitasnya yang berkaitan dengan manajemen cater.
12. PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri wajib memiliki peralatan computer dan printer serta server dengan jumlah dan kapasitas memory yang cukup untuk digunakan dalam proses pengolahan data/verifikasi data, lengkap dengan aplikasi MDSM dengan fasilitas terkait.
13. PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri wajib menyediakan suatu aplikasi pengelolaan data stand meter yang compatible dengan aplikasi PT. PLN (Persero) Cabang Sigli serta wajib menyediakan aplikasi pengelolaan RBM dan dilengkapi dengan struktur data base yang diharuskan.
14. Memberikan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) yang diterbitkan oleh Bank Umum (*Surety Bond*) yang ditunjuk Pemerintah dan berlaku efektif pada tanggal berlakunya PERJANJIAN dan mempunyai masa berlaku yang sama dengan PERJANJIAN ditambah dengan 30 (tiga puluh) hari.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama dibidang jasa borongan baca meter ini, diberikan oleh PT. (PLN) Persero Cabang Sigli kepada PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri. dengan cara penunjukan secara langsung tanpa adanya pengadaan terlebih dahulu. PT. PLN (Persero) Cabang Sigli pada tanggal 12 November 2008. mengirimkan surat undangan nomor 012.SU/610/PAN-AO&TU/SGL/2008, kepada PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri untuk menghadiri rapat mengenai penunjukan langsung dan penawaran harga untuk pekerjaan jasa borongan baca meter tersebut.

Pada kontrak, berakhirnya perjanjian antara kedua belah pihak ini, diatur dalam Pasal 19 tentang Berakhirnya Perjanjian. Bunyi dari Pasal 19 ini, yaitu antara lain;

1. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas baca angka kWh meter dan atau;
  - a. Jika dikuasakan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan atau,
  - b. Jika pelaksanaan pekerjaan baca meter ini tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tersebut dalam surat perjanjian dan atau,
  - c. Jika pelaksanaan pekerjaan baca meter dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan itikad tidak baik dan atau;
2. Jika pelaksanaan pekerjaan baca angka kWh meter tidak diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian, maka PIHAK PERTAMA berhak mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai ketidakpuasan atas pelaksanaan pekerjaan baca angka kWh meter dan PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 16 C poin 5 perjanjian ini, dan berhak memutus perjanjian secara sepihak tanpa memberlakukan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Dalam hal pemutusan perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan mengambil alih pelaksanaan pekerjaan baca meter dan selanjutnya pelaksanaan pekerjaan baca meter tersebut akan diserahkan kepada PIHAK LAIN termasuk didalamnya pengalihan tenaga kerja dari PIHAK KEDUA.
4. Garansi Bank (*Performance Bond*) akan dicairkan oleh PT. PLN (Persero).
5. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan sebelumnya kepada PIHAK LAINNYA apabila PIHAK LAINNYA telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
6. Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), para pihak sepakat tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. PIHAK KEDUA dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PIHAK KEDUA selama 7

- (tujuh) hari kerja terhitung sejak batas akhir pembayaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (2).
8. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak tanggal surat pemberitahuan dan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya.
  9. Salah satu PIHAK berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya karena alasan-alasan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini dengan persetujuan PIHAK LAINNYA, dengan memberitahukan kepada PIHAK LAINNYA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, sebelum pengakhiran dan PIHAK yang menerima pemberitahuan harus memberikan tanggapan untuk persetujuan atau penolakan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender, sejak menerima pemberitahuan.

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>14</sup>

Namun, dalam kasus ini wanprestasi terjadi karena upah kerja yang seharusnya dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Sigli tidak dibayarkan sampai pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian oleh PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab tidak dibayarkannya upah kerja untuk pekerjaan borongan baca meter ini, karena dana untuk pembayaran pekerjaan borongan baca meter tersebut, telah digunakan untuk keperluan atau pekerjaan lain, yaitu pemborongan pekerjaan pembangunan instalasi listrik di daerah Aceh Tamiang.

Dalam kontrak perjanjian antara PT, PLN (Persero) Cabang Sigli dengan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri tidak ada mengatur mengenai wanprestasi secara terperinci, seperti kontrak-kontrak perjanjian pada umumnya. Dalam kontrak ini, hanya mengatur wanprestasi secara garis besar, seperti yang tertulis pada Pasal 19 ayat (5) yang mengatakan “ Salah satu PIHAK dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan sebelumnya kepada PIHAK lainnya

---

<sup>14</sup> Abdul R Saliman, , *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2004, hal.15.

apabila PIHAK lainnya telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama dibidang jasa borongan baca meter ini, diberikan oleh PT. (PLN) Persero Cabang Sigli kepada PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri. dengan cara penunjukan secara langsung tanpa adanya pengadaan terlebih dahulu. PT. PLN (Persero) Cabang Sigli pada tanggal 12 November 2008, mengirimkan surat undangan nomor 012.SU/610/PAN-AO&TU/SGL/2008, kepada PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri untuk menghadiri rapat mengenai penunjukan langsung dan penawaran harga untuk pekerjaan jasa borongan baca meter tersebut.

Setelah semua persyaratan dipenuhi, berdasarkan surat perintah kerja nomor 012.PJ/610/AO-TU/SGL/2008 dibuatlah kontrak kerja pada tanggal 01 Desember 2008 antara PT. PLN (Persero) Cabang Sigli dengan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri di Kantor PT. PLN (Persero) Cabang Sigli. Dalam perjanjian, para pihak yang melaksanakan pekerjaan, yaitu antara lain:

1. PT. PLN (Persero), yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Soetjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Haryanto, SH di Jakarta Nomor 43 tanggal 26 Oktober 2001, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M-1/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh Nahwaluddin selaku Manajer PT. PLN (Persero) Nomor : 0812.K/426/DIR/2008 tanggal 08 Mei 2008, yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, No. 3, Sigli, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas PT. PLN (Persero), yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sabaruddin Salam, SH Nomor 42 tanggal 05 Agustus 2008 dengan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-27512 HT .01.01.TH. 2005 tanggal 06 Oktober 2005 yang dalam hal ini diwakili oleh ZAKKI MUAMMAR selaku Direktur Utama, yang beralamat di Jalan Sri Ratu Safiatuddin No. 9, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas PT. Multi Guna Putra

Aceh Mandiri selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan PERJANJIAN Pemborongan Pekerjaan *Outsourcing* Baca Meter Tarif Tunggal di PT. PLN (Persero) Cabang Sigli, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, berdasarkan:

1. Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 001.E/DIR/2007, tanggal 29 Januari 2007.
2. Surat dari General Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam No.187/545/W.NAD/2008, tanggal 29 Januari 2008.
3. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA No. 001/MGP-SGL/XI/2008, tanggal 18 November 2008.
4. Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam Cabang Sigli No. 012.K/610/SGL/2008, tanggal 28 November 2008.

Kemudian, setelah kontrak dibuat maka kedua belah pihak harus menandatangani kontrak tersebut sebagai tanda bahwa perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) dan setelah penyedia barang/jasa yang ditunjuk menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan:

1. Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (Lima Persen) dari nilai kontrak dan sudah termasuk PPN.
2. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai 30 (Tiga Puluh) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.
3. Pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh pengguna barang/jasa, maka jaminan penawaran yang bersangkutan segera dikembalikan.

Setelah melakukan penandatanganan, maka pelaksanaan perjanjian pemborongan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, dimana pihak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri telah sepakat dengan PT. PLN (Persero) Cabang Sigli untuk melaksanakan pekerjaan borongan baca meter di Kota Sigli. Pembacaan kWh meter ini, dimulai tanggal 15 (lima belas) dan batas

akhir pembacaan kWh meter adalah tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan, atau ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA/ yang mewakili.

Perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak telah berlangsung selama 4 (empat) periode, yaitu sebagai berikut;

1. Kontrak pertama, No. 012.PJ/610/AO-TU/SGL/2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 582.120.000,- berlangsung mulai tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan 31 Maret 2009.
2. Kontrak kedua, No. 07.PJ/610/AO-TU/SGL/2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.486.170.000,- berlangsung mulai tanggal 3 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.
3. Kontrak ketiga, No. 040.SPP/610/AO-NIAGA&PP/SGL/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.760.000.000'- berlangsung mulai tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan 30 Desember 2011.
4. Kontrak keempat, No. 001.SPP/610/AO-NIAGA&PP/SGL/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.866.500.000,- berlangsung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu No. 130.PJ-AMD/610/TREN-YANAD/SGL/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan No. 268.PJ-AMD/610/TREN-YANAD/SGL/2012 tanggal 1 September 2012.

Semua pekerjaan ini, dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh kedua belah pihak didalam kontrak perjanjian. Pihak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri telah melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diatur didalam kontrak perjanjian dengan baik dan benar tanpa ada melakukan kesalahan sedikitpun. Namun pada kenyataannya hak menerima upah dari hasil kerja untuk PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri tidak diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) Cabang Sigli. PT. PLN (Persero) Cabang Sigli sampai dengan habisnya masa kontrak yang terakhir, belum juga melunaskan sisa pembayaran upah kerja tersebut sampai dengan saat ini.

Mengenai berapa jumlah sisa pembayaran yang belum dilunasi oleh pihak PT. PLN (PERSERO) Cabang Sigli kepada pihak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri, kedua belah pihak tidak dapat memastikan jumlahnya secara rinci. Karena, semua pegawai dari pihak PT. PLN yang dulunya bertugas mengawasi

kegiatan borongan pekerjaan dibidang jasa baca meter ini, sudah tidak bekerja lagi. Sehingga pegawai pengganti atau pegawai yang baru tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sebelumnya.

Pasal 1381 KUH Perdata, juga mengatur mengenai berakhirnya perjanjian. Bunyi dari pasal ini, yaitu sebagai berikut; Perikatan hapus dikarenakan;

- a. Karena pembayaran,
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,
- c. Karena pembaruan utang,
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi,
- e. Karena percampuran utang,
- f. Karena pembebasan utang,
- g. Karena musnahnya barang yang terutang,
- h. Karena kebatalan atau pembatalan,
- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam BAB 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan
- j. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam satu bab sendiri.

Dalam kontrak perjanjian pada Pasal 25 ayat (1), dinyatakan bahwa “apabila terjadi perselisihan pendapat (sengketa) dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini, para PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat”. Maka oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini, dengan jalan musyawarah dan mufakat. Namun, kenyataannya sampai pada saat ini permasalahan tersebut belum juga terselesaikan dan pihak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri sampai dengan saat ini belum menerima haknya sesuai dengan perjanjian yang ada.

Meskipun didalam kontrak mengatur mengenai tanggung jawab dan ganti rugi, namun sampai saat ini walaupun pekerjaan tersebut telah selesai, pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sigli belum juga melunasi atau membayar upah kerja kepada PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri. Karena, apabila dipertanyakan mengenai perihal pembayaran tersebut, PT. PLN (Persero) Cabang Sigli selalu memberikan jawaban yang menggantung kepada pihak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri.



Dalam hal ini, dinilai bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Sigli tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri. Seharusnya, pihak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri, dapat menggugat pihak PT. PLN (Persero) Cabang Sigli, jika PT. PLN (Persero) Cabang Sigli tidak juga membayar upah kerja yang sudah dijanjikan sesuai dalam kontrak perjanjian. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Sigli. Karena, dalam kasus ini PT. PLN (Persero) Cabang Sigli telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu PT. PLN (Persero) Cabang Sigli, harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Namun, sampai dengan saat ini pihak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Setempat, karena masih memberikan kesempatan untuk melunasi upah kerja tersebut kepada pihak PT. PLN (Persero) Cabang Sigli sampai batas waktu yang belum ditentukan oleh kedua belah pihak. Mengapa demikian? Karena, pihak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri tidak mau merusak hubungan kerjasama yang sudah terjalin lama antara PT. PLN (Persero) Cabang Sigli dengan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dibidang jasa borongan baca meter ini, diberikan oleh PT. (PLN) Persero Cabang Sigli kepada PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri. dengan cara penunjukan secara langsung tanpa adanya pengadaan terlebih dahulu. PT. PLN (Persero) Cabang Sigli pada tanggal 12 November 2008. Setelah semua persyaratan dipenuhi, berdasarkan surat perintah kerja nomor 012.PJ/610/AO-TU/SGL/2008 dibuatlah kontrak kerja pada tanggal 01 Desember 2008 antara PT. PLN (Persero) Cabang Sigli dengan PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri di Kantor PT. PLN (Persero) Cabang Sigli. Setelah melakukan penandatanganan, maka pelaksanaan perjanjian pemborongan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak , dimana pihak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri telah sepakat dengan PT. PLN (Persero) Cabang Sigli untuk melaksanakan pekerjaan borongan baca meter di Kota Sigli. Pembacaan kWh meter ini, dimulai tanggal 15 (lima

belas) dan batas akhir pembacaan kWh meter adalah tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan, atau ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA/ yang mewakili.

2. Faktor penyebab dari terjadinya wanprestasi, yaitu; tidak dibayarkannya upah kerja untuk pekerjaan borongan baca meter ini, karena dana untuk pembayaran pekerjaan borongan baca meter tersebut, telah digunakan untuk keperluan atau pekerjaan lain, yaitu pemborongan pekerjaan darurat pembangunan instalasi listrik di daerah Aceh Tamiang.
3. Pertanggungjawaban dari pihak PT. PLN (Persero) Cabang Sigli terhadap wanprestasi yang dilakukannya tersebut, sampai saat ini belum ada. Namunwalaupun demikian, pihak PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri tetap memberikan kesempatan untuk pihak PT. PLN (PERSERO) Cabang Sigli untuk membayar upah kerja yang telah tercantum di dalam kontrak perjanjian borongan baca meter tersebut.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya penjelasan mengenai hak dan kewajiban untuk para pihak. Sehingga perjanjian ini dapat berjalan dengan seimbang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta agar tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Seharusnya PT. PLN (Persero) Cabang Sigli, terlebih dahulu menjalankan kewajibannya untuk membayar upah kerja kepada PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri dan PT. PLN (Persero) Cabang Sigli harus menyiapkan anggaran yang lain, apabila ada membuat perjanjian baru dengan Pihak Ketiga. Sehingga perjanjian baru tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
3. Seharusnya PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sigli untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak PT. PLN (Persero) Cabang Sigli atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut. Karena perbuatan yang telah dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Sigli menyebabkan kerugian yang dialami oleh PT. Multi Guna Putra Aceh Mandiri sangat besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

H. HS, Salim., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2003.

Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Saliman, R, Abdul, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Smit, C., *Masalah Perjanjian Pemborongan*, (terjemahan Hr. Sugihardjo), Jogjakarta, tanpa tahun.

Soedewi Sri, *Hukum Perutangan*, Terjemahan Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Yogyakarta: UGM, 1974.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa Masa, 1979.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara RI Nomor 133 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052.